

Selain Jalan Lingkar

# Pemkab Rancang Lima Proyek Lain di Nusa Penida

Semarapura (Bali Post) -

Pembangunan di Kepulauan Nusa Penida yang anggarannya diusulkan Pemkab Klungkung ke pemerintah pusat tak hanya berupa jalan lingkar. Namun, masih ada lima proyek besar lainnya. Berdasarkan perkiraan, anggaran yang dibutuhkan mencapai ratusan miliar rupiah.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) Klungkung I Wayan Wasta, belum lama ini, menyatakan untuk mendukung status Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), pembangunan lain yang dirancang Pemkab untuk bisa terealisasi, yakni jembatan baru penghubung Nusa Ceningan dan Lembongan yang menelan anggaran sekitar Rp 65 miliar.

*Review Detail Engineering Design* (DED)-nya sudah dilaksanakan pada 2013 dan pada 2014 dilanjutkan dengan UKL-UPL. Ada pula peningkatan jalan kabupaten yang membutuhkan anggaran sekitar Rp 75,4 miliar. Selain itu, dalam pemenuhan air bersih yang kini masih menjadi persoalan, juga direncanakan ada pengembangan Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) yang memanfaatkan mata air. Anggaran yang diperlukan pun sangat besar, yakni sekitar Rp 24 miliar.

Guna mendukung ini, pelaksanaan *Feasibility Study* (FS) dan DED sudah berlangsung pada 2016.

Pembangunan tanggul pengamanan pantai juga sangat diharapkan bisa terealisasi. FS dan DED-nya disiapkan Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida. Anggaran yang diperlukan sekitar Rp 179,4 miliar. Sebagai daerah kepulauan, pembangunan pelabuhan segi tiga emas yang berlokasi di Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan, Dusun Sampalan Desa Batununggul, dan Bias Munjul Nusa Ceningan, juga tetap masuk sebagai skala prioritas.

Bahkan untuk di Dusun Sampalan, pembahasan finalisasi *Master Plan* dan DED sudah berlangsung. Pembangunan untuk ketiganya, diperkirakan menelan anggaran Rp 155 miliar. Mengingat anggaran keseluruhan yang dibutuhkan sangat fantastis, pemkab pun melakukan hal serupa dengan pembangunan jalan melingkar, yakni mengusulkan permohonan bantuan ke pemerintah pusat melalui kementerian masing-masing. "Untuk anggaran kami tetap mengusulkan bantuan ke pemerintah pusat," ungkapnya. (kmb45)

Edisi : Sabtu, 18 NOV 2017

Hal : 10

## Misteri Amplop dalam Kasus OTT di Gianyar

# Kadis dan Polisi Dikonfrontasi

Denpasar (Bali Post) -

Pengadilan Tipikor Denpasar terpaksa mengonfrontasi keterangan Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Gianyar, tersangka I Ketut Mudana, dengan dua penyidik Reskrimsus Polda Bali. Pasalnya, dalam sidang sebelumnya, Mudana yang menjadi saksi untuk terdakwa Drs. I Nyoman Sukarja, M.Si. selaku Kabid Perizinan dan Nonperizinan B, keterangannya tiga kali berubah-ubah. Terutama soal angka 15, 50 dan 75 yang awalnya dinilai sebagai kode pembayaran ilegal dalam pengurusan izin di Gianyar.

Pertama, keterangan saksi (tersangka Mudana - red) dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar terungkap bahwa angka-angka tersebut ditulis saksi saat diperiksa penyidik Krimsus Polda Bali bernama Widia. Saksi mengaku bahwa angka (15, 50 dan 75) itu ada artinya. Namun saat diperiksa penyidik atas nama Sarka, saksi Kadis Perizinan mengaku bahwa tulisannya itu tidak bermakna apa-apa. Kadis mengaku hanya hobi menulis angka. Namun dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Denpasar,

saksi mengatakan bahwa itu adalah sesuai SOP. Inilah yang kemudian disangsikan, baik oleh hakim, jaksa maupun tim kuasa hukum terdakwa Sukarja. Apalagi dalam Peraturan Bupati Gianyar jelas disebut jangka waktu pengu-rasan izin maksiml 14 hari.

Atas keterangan yang berubah itulah, Rabu (22/11) lalu Pengadilan Tipikor mengonfrontasi keterangan Mudana dengan penyidik Krimsus, Widia dan Sarka. Selain itu, muncul juga misteri dua amplop perintah Mudana ke Sukarja yang salah satunya untuk Gusti Made Madra.

Majelis hakim pimpinan Wayan Sukanila menghadirkan Sudana dan dua polisi itu karena pascapengakuan berbeda dari Mudana, saksi mengaku dipaksa dan diberikan janji-janji seperti janji akan dibantu oleh penyidik Reskrimsus Polda Bali.

Saat ditanya mekanisme pemeriksaan oleh hakim, saksi Widia mengatakan saat memeriksa Mudana sebagai saksi, awalnya ditanyakan tentang kesehatan dan ditanyakan tentang perkara. Setelah itu, baru masuk pokok perkara.

Widia mengatakan, selesai

pemeriksaan dan hasilnya di-print dan dibaca oleh Mudana. "Setelah setuju, ditandatangani," ucap Widia dalam kesaksiannya.

Ditambahkan, saksi Kadis Mudana diperiksa mulai pukul 18.00 Wita hingga pukul 02.00 Wita. "Saat itu paginya OTT Sukarjana, saksi diperiksa sekaligus memberikan keterangan untuk Sukarja," jelas Widia.

Apakah pemeriksaan maraton sampai pukul 02.00 Wita? Polisi mengatakan ada jeda makan malam. Hakim mulai menanyakan pada pokok konfrontir, yakni soal adanya pengakuan saksi dipaksa saat berada di ruangan penyidik Polda Bali.

Widia mengatakan, ruangan pemeriksaan tidak tertutup. "Bisa dilihat karena pakai kaca. Tidak ada paksaan," bantah Widia.

Widia hanya membenarkan bahwa Mudana saat itu hendak tirtayatra. Namun penyidik meminta Mudana menyelesaikan dulu urusannya. "Saya katakan selesaikan urusannya biar bisa bapak tenang sembahyang," jawab Widia di muka persidangan.

"Katanya nawarkan bantuan? Benar itu?" tanya hakim, mengonfrontir keterangan saksi.

Widia membantah hal itu. "Jujur, tidak ada saya katakan itu. Hanya menyarankan, urungkan dulu tirtayatra dan selesaikan pemeriksaan biar tenang nanti sembahyang," jelas Widia.

Karena adanya bantahan polisi melakukan pemaksaan dan janji membantu, kuasa hukum Sukarja, Dega Erlangga, mencoba menanyakan jawaban polisi ke Sudana. Namun tidak diizinkan oleh hakim karena pekan lalu Mudana sudah menyampaikan hal itu.

Selain itu, soal SOP yang ditemukan polisi dengan SOP yang diserahkan ke majelis hakim

berbeda. Sehingga Dega Erlangga menanyakan soal SOP itu, apakah SK Bupati, apakah kebijakan atau hanya perintah secarik kertas. Polisi mengatakan ada SOP dan sudah diperlihatkan ke hakim.

Yang menarik, polisi juga mengungkap misteri amplop, di mana Mudana memerintahkan Sukarja. Dengan bahasa Bali, polisi mengatakan, "Amplop ane besik isinin Rp 300 ribu isi nama Gusti Made Madra. Ane besik isinin Rp 200 ribu," ujar polisi.

JPU Suardi mencoba mengejar sumber dana amplop itu. Namun polisi belum mengejar pertanyaan sampai di sana. (kmb37)

Edisi : Kamis, 14 Nov 2017

Hal :



## Soal Kasus Tukad Mati Jadi Ahli di Praperadilan, BPKP Akui Belum Lakukan Audit

Denpasar (Bali Post) -

Tim kuasa hukum Wayan Seraman dan sekaligus tim kuasa hukum Anak Agung Gede Dalem berharap majelis hakim mempertimbangkan bahwa kasus korupsi harus adanya penghitungan kerugian keuangan negara dari lembaga berwenang. Salah satunya dari BPK atau BPKP.

Sementara ahli BPKP Perwakilan Bali, Doso Sukendro, selaku koordinator investigasi di BPKP saat memberikan keahliannya di pengadilan Kamis (9/11) lalu, beberapa kali ditanya soal hasil audit yang dilakukan berdasarkan permohonan kejaksaan. Walau sudah melakukan ekspos, pihak BPKP belum melakukan audit kerugian keuangan negara. Sehingga tim kuasa hukum pemohon Simon Nahak dan Wayan Mardika, juga berpendapat tidak ada kerugian negara dalam perkara sanderan Tukad Mati karena tidak ada perhitungan kerugian negara dari BPK atau BPKP.

"Ya, jelas ahli BPKP mengatakan belum ada audit dari BPKP," tandas Mardika. Pun ahli dari Unnes. Menurutnya, secara tegas ahli dari Unnes menyatakan bahwa mereka tidak ada menghitung kerugian negara. "Tugas mereka hanya mencari kekurangan volume dan kekuatan campuran dan pasangan," tandas Mardika. Jadi, dalam kasus Tukad Mati, menurutnya jelas belum ada penghitungan kerugian negara yang jelas, sehingga status tersangka tidak sah.

Sebelumnya, termohon praperadilan menghadirkan tiga orang ahli dan saksi. Mereka adalah

Made Lovi Pusnawan. Pemohon melalui kuasa hukumnya Simon Nahak dkk., keberatan. Pasalnya Lovi adalah penyidik kejaksaan di mana yang menjadi termohon adalah kejaksaan cq Kajari Denpasar. Namun, hakim praperadilan tetap melanjutkan mendengarkan keterangan Lovi dengan catatan harus netral.

Lovi Pusnawan mengatakan, penyelidikan sanderan Tukad Mati menjadi penyelidikan kejaksaan diawali dari adanya laporan pengaduan, yakni adanya kerusakan proyek sanderan Tukad Mati. Dari sana melakukan puldata dan pulbaket hingga akhirnya keluar surat perintah penyelidikan.

Dari hasil penyelidikan diketahui adanya indikasi korupsi sehingga dilakukan gelar perkara. Dikatakan bahwa dari ekspos ditemukan adanya dugaan tindak pidana.

Sementara ahli Dr. Rini Kuswardani dari Universitas Negeri Semarang di muka persidangan mengaku melakukan kajian. Kajian yang dilakukan sudah standar SNI. Ahli menguji 22 titik dari 25 titik yang semestinya dilakukan penelitian.

Pun saat ditanya termohon melalui Dewa Lanang, yang mengkonotasikan bahwa proyek itu gagal, ahli tidak membantahnya. Ahli bersama tim melakukan pengecekan dan kajian di lokasi selama dua hari.

"Turun bersama tim, ada dari ahli, kontraktor dan juga dari kejaksaan. Kami di sana mencari sampel agar bisa diuji. Misalnya semen dan campuran pasirnya," tandas ahli. (kmb37)

Edisi : Sabtu, 11 NOV 2017

Hal : 7



Dugaan Korupsi APBDes Dencarik

# Kerugian Negara Sesuai Perhitungan BPKP

Singaraja (Bali Post) -

Kejaksanaan Negeri (Kejari) Singaraja akhirnya membeberkan dugaan penyalahgunaan APBDes Dencarik, Kecamatan Banjar, tahun 2015 dan tahun 2016 oleh Perbekel I Made Suteja. Dari perhitungan BPKP yang diterbitkan 24 Oktober 2017, total kerugian negara akibat kasus ini Rp 149.530.551. Indikasi penyalahgunaan adalah, perbekel tidak melaporkan seluruhnya Pendapatan Asli Desa (PAD) hingga pemanfaatannya diduga di luar perencanaan APBDes atau bisa disebut dengan istilah *out budget*.

Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Singaraja Indra Harvianto Saleh, S.H., M.H. di ruang kerjanya, Jumat (10/11) kemarin menjelaskan, hasil penyidikan dan penyelidikan menyebutkan bahwa pada APBDes Dencarik tahun 2015 pada sektor PAD tidak dilaporkan secara menyeluruh. Saat itu, total PAD Rp 119 juta, namun faktanya dana tersebut dimasukkan pada APBDes Rp 39 juta. Dengan demikian, ditemukan selisih pencatatan PAD Rp 80 juta. Sedangkan dalam APBDes tahun 2016 sektor PAD yang seharusnya dicatatkan Rp 60 juta, namun dalam APBDes di tahun itu dimasukkan Rp 33 juta. Dugaan pelanggaran lainnya adalah sisa anggaran pelaksanaan kegiatan fisik di desa tidak dilaporkan dalam APBDes dan juga laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ). PAD itu sendiri berasal dari pungutan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) dan pendapatan lain-lain yang sah. "Hasil pemeriksaan kami dan bantuan perhitungan BPKP menemukan kerugian negara akibat perbuatan perbekel dengan jumlah total Rp 149.530.551," katanya.



Bali Post/kmb38

**Indra Harvianto Saleh, S.H., M.H.**

Menurut Harvianto, PAD yang tidak dilaporkan keseluruhan itu digunakan untuk beberapa kegiatan di desa. Kegiatan itu di antaranya pembelian dua are tanah untuk perluasan kantor perbekel Rp 80 juta. Kegiatan ini pun tidak bisa dijalankan karena kabupaten melarang desa untuk membeli aset dengan dana APBDes. Pembayaran proyek pembangunan pasar desa tahun 2012 yang seharusnya sudah dianggarkan, namun pembayarannya dicicil hingga tahun 2015. Menariknya, perbekel menggunakan dalam APBDes untuk bantuan sosial (bansos - red) yang sebenarnya untuk kepentingan pribadi, perjalanan dinas dalam kabupaten, dan pinjaman untuk uang saku untuk kegiatan ke luar negeri. Tidak hanya itu, perbekel diduga melakukan pertanggungjawaban fiktif untuk biaya perbaikan sepeda motor dinas. Keterangan dari pihak bengkel tempat memperbaiki sepeda motor menyebut menghabiskan biaya Rp 800.000, tetapi dari pencatatan kas desa dicantumkan Rp 3,4 juta. "Dari kajian kami unsur memperkaya diri atau orang lain dalam kasus ini terpenuhi. Seperti untuk bansos yang itu kepentingan pribadi seperti kondangan orang nikah,

potong gigi, hingga besuk orang sakit menggunakan dana di desa," jelasnya.

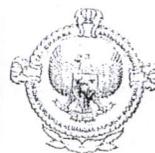
Harvianto menambahkan, dari hasil pemeriksaan itu disimpulkan pelaksanaan APBDes tahun 2015 dan tahun 2016 itu bertentangan dengan Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri No. 113 dan Peraturan Bupati (Perbup) No. 73 Tahun 2014. Regulasi itu mengamanatkan bahwa seluruh pendapatan/penerimaan dan pengeluaran masuk rekening desa kemudian pemanfaatannya ditetapkan dalam APBDes. "Regulasi itu sudah mengamanatkan pemakaian dana desa harus melalui mekanisme yang sudah diatur dan dalam kasus ini mekanisme itu tidak dilalui, sehingga bertentangan dengan regulasi yang ada," jelasnya.

## Audit Inspektorat

Terkait audit Inspektorat Daerah yang tidak menemukan pelanggaran, Harvianto mengakui kalau dari hasil koordinasi dengan Inspektorat Daerah memang hasil audit terhadap APBDes tahun 2015 tidak ditemukan pelanggaran. Bahkan, laporan keuangan yang diperiksa itu dinyatakan seimbang (*balance - red*). Akan tetapi, hasil penyidikan Kejari justru menemukan bukti lain berupa pencatatan keuangan yang dipegang bendahara di desa. Dari pencatatan keuangan itu ditemukan bukti penggunaan dana desa yang tidak melalui mekanisme dalam APBDes. "Kalau Inspektorat tidak menemukan, tapi kita yang menemukan. Dari buku kas tambahan untuk kontrol dan ada tulisan tangan bendahara kita temukan pemakaian dana desa untuk kegiatan di luar APBDes," katanya. (kmb38)

Edisi : Sabtu, 11 Nov 2017

Hal : 11



Bali Post/kmb24  
**BERPAMITAN - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Daerah melaksanakan exit briefing sekaligus berpamitan kepada Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti dan para OPD Tabanan, Kamis (9/11) di ruang rapat Kantor Bupati Tabanan.**

## BPK Periksa Kinerja Pendidikan dan Kesehatan

Tabanan (Bali Post) -

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Bali melakukan pemeriksaan terhadap kinerja pendidikan dan kesehatan Pemkab Tabanan selama kurang lebih sebulan ini. Tim Audit BPK itu kemudian melaksanakan *exit briefing*, sekaligus berpamitan kepada Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti dan para OPD Tabanan di ruang rapat Kantor Bupati Tabanan, Kamis (9/11) kemarin.

Kepala Perwakilan BPK Bali Yulindra Tri Kusuma Nugraha mengapresiasi jajaran Pemkab Tabanan sehingga proses pemeriksaan berjalan tertib dan lancar. Pihaknya juga memberikan *review* serta saran tentang apa yang perlu diperbaiki di bidang kesehatan maupun pendidikan. Contoh di bidang kesehatan misalnya, terdapat empat aspek yang ditekankan, yakni perencanaan obat, distribusi, penggunaan dan monitoring. Pihaknya mengungkapkan perencanaan obat telah berjalan dengan baik, mekanisme perencanaan juga sudah bagus. Aspek lainnya dikatakan perlu perbaikan.

Di bidang pendidikan juga ada empat aspek memegang kunci penting, yakni kualitas guru, sertifikasi, kompetensi dan distribusi/pemerataan guru. Disadari masih ada guru yang belum S-1, serta distribusi guru belum merata.

Bupati Eka mengatakan, pemeriksaan BPK ini adalah suatu hal sangat positif. Dengan diperiksa dan dievaluasi, Pemkab Tabanan akan selalu belajar dan selalu *me-review* kekurangan-kekurangan di dalam pertanggung jawaban keuangan, program-program pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan.

Menanggapi beberapa aspek masih perlu diperhatikan di bidang kesehatan maupun pendidikan, Bupati Eka mengatakan semua itu akan segera dikoordinasikan dan ditindaklanjuti dengan baik. "Untuk masalah guru memang masih ditemukan guru yang belum S-1. Kami akan coba mendata kembali. Kalau memang mereka produktif akan terus kami dorong untuk maju. Keberadaan guru belum merata perlu dilihat lagi, sehingga yang kurang ditambahi. Namun kami mohon waktunya," ucapnya. (kmb24)

Edisi : Jumat, 10 Nov 2017

Hal : 4